



## Cari Bukti Dugaan Korupsi

# Kejari Mulai Obok-obok

## Pemkot Denpasar

**Kajari Denpasar, Imanuel Zebua mengatakan anak buahnya sedang melakukan puldata (pengumpulan data) terkait dugaan korupsi di Pemkot Denpasar.**

DENPASAR, NusaBali

Janji Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Denpasar ternyata bukan isapan jempol belaka. Pada, Senin (30/3) pagi, beberapa jaksa penyidik Kejari

Denpasar melakukan penggeledahan di Bagian Umum dan Bagian Hukum Pemkot Denpasar untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi. Informasi yang dihimpun beberapa jaksa yang dipimpin Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir mendatangi Pemkot Denpasar pada, Senin pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Mereka langsung menuju Bagian Umum dan Bagian Hukum yang berada di lantai II dan III gedung Walikota Denpasar.

Dalam penggeledahan ini, penyidik mencari dokumen dan data-data terkait dugaan korupsi yang terjadi di instansi yang berada di bawah pimpinan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijata Mantra ini. Namun, upaya pengumpulan data ini tidak membuahkan hasil

karena pihak Bagian Umum dan Bagian Hukum menolak memberikan dokumen dan data dengan alasan harus meminta ijin dari Sekkot Denpasar.

Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkot Denpasar, Ni Komang Lestari Kusuma yang sempat ditemui membenarkan kedatangan penyidik Kejari Denpasar. Ia mengatakan sempat ditemui Kasi Intel yang ingin bertemu Kabag Hukum dan Kabag Keuangan untuk berkordinasi masalah data terkait temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) beberapa waktu lalu.

Tapi karena Kabag Hukum dan Kabag Keuangan tidak berada di tempat, pihaknya tidak memberikan dokumen ataupun data yang diminta pihak kejaksaan. "Nanti akan dikoor-



Cari Bukti Dugaan Korupsi

# Kejari Mulai Obok-obok

## Pemkot Denpasar

**Kajari Denpasar, Imanuel Zebua mengatakan anak buahnya sedang melakukan puldata (pengumpulan data) terkait dugaan korupsi di Pemkot Denpasar.**

DENPASAR, NusaBali

Janji Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Denpasar ternyata bukan isapan jempol belaka. Pada, Senin (30/3) pagi, beberapa jaksa penyidik Kejari

Denpasar melakukan pengeledahan di Bagian Umum dan Bagian Hukum Pemkot Denpasar untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi. Informasi yang dihimpun beberapa jaksa yang dipimpin Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir mendatangi Pemkot Denpasar pada, Senin pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Mereka langsung menuju Bagian Umum dan Bagian Hukum yang berada di lantai II dan III gedung Walikota Denpasar.

Dalam pengeledahan ini, penyidik mencari dokumen dan data-data terkait dugaan korupsi yang terjadi di instansi yang berada di bawah pimpinan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijata Mantra ini. Namun, upaya pengumpulan data ini tidak membuahkan hasil

karena pihak Bagian Umum dan Bagian Hukum menolak memberikan dokumen dan data dengan alasan harus meminta ijin dari Sekkot Denpasar.

Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkot Denpasar, Ni Komang Lestari Kusuma yang sempat ditemui membenarkan kedatangan penyidik Kejari Denpasar. Ia mengatakan sempat ditemui Kasi Intel yang ingin bertemu Kabag Hukum dan Kabag Keuangan untuk berkordinasi masalah data terkait temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) beberapa waktu lalu.

Tapi karena Kabag Hukum dan Kabag Keuangan tidak berada di tempat, pihaknya tidak memberikan dokumen ataupun data yang diminta pihak kejaksaan. "Nanti akan dikoor-



Sambungan.

dinasikan lagi karena Kabag Keuangan kan perlu lapor ke Pak Sekkot apakah diberikan ijin atau tidak. Karena Pak Kabag Keuangan sedang rapat di provinsi dan Kabag Hukum sedang di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum, I Made Pasek Mandira yang ditemui mengatakan tidak tahu menahu soal temuan BPK yang menjadi rujukan tim kejaksaan turun melakukan pemeriksaan di Pemkot Denpasar. Namun ia menduga temuan tersebut terkait dana perjalanan dinas yang dianggarkan di APBD sebesar Rp 32 miliar termasuk untuk DPRD dan SKPD. "SKPD apa itu yang tidak tahu. Apa yang dimaksud penyimpangannya juga tidak tahu," jelasnya.

Sementara itu, Kajari Den-

pasar, Imanuel Zebua membenarkan penyidik yang turun ke Pemkot Denpasar. Ia mengatakan anak buahnya sedang melakukan puldata (pengumpulan data) terkait dugaan korupsi di Pemkot Denpasar. Namun, Imanuel enggan merinci penggeledahan tersebut termasuk menyebutkan dokumen atau data yang sudah disita. "Belum ada laporan lengkap," ujarnya.

Sebelumnya, Zebua mengatakan pihaknya sedang mendalami indikasi korupsi yang dilakukan 2 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemkot Denpasar dan satu SKPD di Pemkab Badung. Namun tidak dijelaskan SKPD ataupun korupsi yang dilakukan karena takut pihak terkait menghilangkan barang bukti. rez



## Bupati Agung Bharata Sampaikan LKPJ 2014



• NUSABALI/WILASA

Bupati AA Gde Agung Bharata (kiri) menyerahkan Buku LKPJ 2014 kepada Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Togog.

GIANYAR, NusaBali

Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014. LKPJ disampaikan dalam Sidang DPRD Gianyar di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Senin, (30/3).

Dia menyatakan bersyukur karena dapat memenuhi kewajiban konstitusional untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2014. LKPJ sesuai amanat UU No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. "Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para pimpinan dan segenap anggota

DPRD Kabupaten Gianyar, atas dukungan dan kerjasamanya," ujarnya.

LKPJ Kepala Daerah merupakan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Penyampaian progress report ini merupakan refleksi akuntabilitas bersama antar kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pelaksanaan APBD Tahun 2014 dari sisi pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 1,4 triliun lebih atau 104,19 persen dari rencana Rp 1,34 triliun lebih. Realisasi itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 424,47 miliar atau 120,86 persen dari ren-

cana Rp 351,21 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp 694,46 milyar lebih atau 99,58 persen dari rencana Rp 697,38 milyar rupiah lebih, dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 281,97 milyar lebih atau 95,29 persen dari rencana Rp 295,92 milyar rupiah lebih.

Dari sisi belanja daerah terealisasi Rp 1,35 triliun lebih atau 88,23 persen dari rencana sebesar Rp 1,53 triliun lebih. Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 199,63 milyar rupiah lebih, terealisasi 100 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp 8,5 milyar lebih, terealisasi 100 persen. "Secara umum pembangunan di berbagai bidang mengalami peningkatan, dan mengenai penjelasan yang lebih rinci. Saya persilahkan dewan yang terhormat untuk meneliti seluruh materi LKPJ ini," ujar Agung Bharata.

Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Togog mengatakan akan mencermati dan mengkaji materi LKPJ yang disampaikan Bupati Agung Bharata. Pihaknya akan membentuk Pansus untuk melaksanakan salah satu fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Gianyar tahun 2014. "Dalam waktu 30 hari, kami akan mempersiapkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, maupun monitoring ke lapangan," jelasnya. @ Isa

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 6



# Ketua BKD Tabanan Dilaporkan ke ORI

★ Terkait Pungutan Rp 100 Ribu kepada CPNS

Dugaan pungutan Rp 100 ribu kepada CPNS itu dilakukan setelah keluarnya pengumuman kelulusan CPNS.

TABANAN, NusaBali

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan, Made Yasa, dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Bali. Petinggi di Pemkab Tabanan itu dilaporkan atas dugaan pungutan Rp 100 ribu kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru dinyatakan lulus.

Informasi di lapangan, dugaan pungutan Rp 100 ribu ini dilakukan oknum di BKD Tabanan untuk memperlancar administrasi pasca-turunnya surat keputusan (SK) untuk 482 CPNS. Rinciannya SK untuk 358 orang dari kategori 2 (K2) dan 124 orang dari kategori umum. SK bagi CPNS ini sendiri sudah dibagikan kepada para CPNS yang lulus oleh Sekkab Tabanan, Nyoman Wirna Ariwangsa di gedung kesenian I Ketut Marya, Rabu (18/3). Sementara dugaan pungutan Rp 100 ribu kepada CPNS itu dilakukan setelah keluarnya pengumuman kelulusan, Januari lalu.

Sumber di lapangan menyebutkan jika Kepala BKD



Made Yasa

• NUSABALI/SUGIANTO

Tabanan, Made Yasa sempat dipanggil ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan untuk dimintai keterangannya soal dugaan pungutan tersebut. Hanya saja sumber di Kejari Tabanan mengatakan belum ada memanggil petinggi di BKD. Namun membenarkan menerima surat dari ORI terkait adanya laporan dari CPNS soal pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk biaya foto kopi. "Ada surat dari ORI terkait laporan CPNS tentang pungutan Rp 100 ribu," ungkap sumber di Kejari Tabanan, Senin (30/3).

Sayang, Kepala BKD Tabanan, Made Yasa yang coba dikonfirmasi per telepon tak bisa dihubungi. Berkali-kali ponselnya dihubungi namun tidak aktif. Upaya lewat pesan

singkat (SMS) juga tak terbalas. Demikian pula ponsel Ketua ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab tak bisa dihubungi karena tidak aktif. Sementara Asisten ORI, Ni Nyoman Sri Widhiyanti dihubungi via BBM membenarkan ada temuan seperti itu. "Ada temuan sih, hanya kebetulan teman yang tangani. Kalau mau lengkapnya, besok ke kantor saja," saran Sri.

Sebelumnya, Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa bagikan SK kepada 384 CPNS di gedung kesenian I Ketut Marya, Rabu (18/3). Dalam keterangannya, Kepala BKD Tabanan Made Yasa menuturkan, CPNS K2 awalnya yang lulus berjumlah 364 orang. Namun satu orang meninggal dan satu orang lagi mengundurkan diri, sementara empat orang berkasnya belum lengkap. "Jadi untuk CPNS K2 yang sudah SKnya kita pegang dan akan kita bagikan yakni 358 orang," ungkap Yasa.

Sementara untuk CPNS umum tercatat yang lulus adalah sebanyak 128 orang, namun empat orang berkasnya belum lengkap. Sehingga pihaknya baru hanya menerima 124 SK. "Untuk yang belum lengkap berkasnya kami persilahkan segera melengkapi, kalau bisa beres pada 18 Maret, akan kita bagikan bersama, namun kalau tidak ya terpaksa menyusul," ucapnya. k21, n

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 7



## Mantan Kadisbud Gagal Dieksekusi



Kuasa hukum terpidana, Ketut Ngastawa (kanan) dan Haposan Sihombing se usai koordinasi di Kejari Denpasar, Senin (30/3).

DENPASAR, NusaBali

Dua terpidana kasus mark up proyek pengadaan sound system dan peralatan lainnya di Taman Budaya Art Center Denpasar tahun 2011, I Ketut

Suastika (mantan Kadis Kebudayaan Provinsi Bali) dan I Ketut Mantara Gandhi (mantan Kepala UPT Taman Budaya Art

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 1*

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 1 dan 15



Sambungan

## Mantan Kadisbud Gagal Dieksekusi

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Center), gagal dijebloskan ke penjara, Senin (30/3). Keduanya tidak memenuhi panggilan untuk dieksekusi pihak kejaksaan, dengan dalih sedang ada upacara adat di kampung halamannya.

Semula, terpidana Ketut Suastika (yang divonis 14 bulan penjara plus denda Rp 100 juta) dan Mantara Gandhi (divonis 13 bulan penjara plus denda Rp 50 juta), akan dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar ke LP Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Senin pagi. Mereka dipanggil datang ke Kejati Bali buat dieksekusi sekitar pukul 09.00 Wita.

Namun nyatanya, hingga Senin siang sekitar pukul 11.00 Wita, kedua terpidana kasus Taman Budaya Art Center Denpasar yang sandang status tahanan kota sejak 3 November 2014 ini, tidak kunjung muncul di Kejari Denpasar. Yang datang ke Kejari Denpasar hanya dua kuasa hukum mereka, yakni I Ketut Ngastawa dan Haposan Sihombing.

Ketut Ngastawa dan Haposan Sihombing datang menemui Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Tangkas cs dan Kasi Pidsus Kejari Denpasar, I Wayan Sutarjana, selaku eksekutor. Setelah berkoordinasi sekitar 1 jam, kuasa hukum kedua terdakwa ini keluar ruangan dan menemui wartawan yang sudah menunggunya di lobi Kejari Denpasar. Kepada pers, kuasa hukum terpidana menyatakan

pihaknya sudah menerima panggilan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk pelaksanaan eksekusi kliennya, Senin kemarin. Namun, terpidana Ketut Suastika dan Mantara Gandhi berhalangan hadir, karena mengikuti upacara adat yang tidak bisa ditinggalkan di kampungnya.

"Pak Suastika sedang menjadi pengarep dalam upacara di kampungnya di kawasan Tabanan. Posisinya selaku pengarep tidak bisa digantikan. Sedangkan Pak Mantara Gandhi

ada upacara kematian kakak iparnya di Desa Angantaka (Kecamatan Abiansemal, Badung)," terang Ketut Ngastawa.

Ngastawa memaparkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan JPU dan Kasi Pidsus Kejari Denpasar terkait penundaan eksekusi kedua terpidana. Saat koordinasi kemarin, pihaknya juga menyampaikan surat dari kedua terpidana berisi alasan penundaan eksekusi, lantaran mereka mengikuti upacara adat di kampung halamannya masing-masing.

Menurut Ngastawa, penundaan eksekusi ini hanya akan berlangsung sepekan. Kedua kliennya nanti akan memenuhi panggilan kejaksaan untuk dieksekusi, 6 April 2015 depan. "Setelah itu, tidak ada alasan lagi. Klien kami siap dieksekusi dan dipastikan akan datang ke Kejari Denpasar untuk dieksekusi," tegas advokat yang sempat kuliah di Fakultas Sastra Unud ini.

Pihak JPU dan Kasi Pidsus Kejari Denpasar selaku eksekutor, kata Ngastawa, juga sudah menyampaikan persetujuan terkait penundaan eksekusi Ketut Suastika dan Mantara Gandhi, dengan alasan kemanusiaan. Apalagi, selama menjalani proses hukum mulai penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kedua terpidana selalu kooperatif dan tak pernah mangkir.

"Penundaan ini semata-mata karena alasan kemanusiaan saja," katanya. Sementara itu, JPU Kejari Denpasar, I Made Tangkas, menyampaikan hal senada dengan Ngastawa cs. Menurut Made Tangkas, penundaan eksekusi mantan Kadis Kebudayaan Bali dan Kepala UPT Taman Budaya Art Center ini karena alasan kemanusiaan. Masalahnya, kedua terpidana sedang melaksanakan upacara adat di kampungnya.

Namun, JPU Made Tangkas memastikan kedua terpidana akan menjalani eksekusi alias dijebloskan ke LP Kerobokan, 6 April depan. "Ini (penundaan

eksekusi) hanya alasan kemanusiaan saja. Pak Suastika dan Mantara Gandhi sedang ada upacara adat, sehingga eksekusi ditunda," jelas Made Tangkas saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin.

Karena itu, pihaknya membantah adanya keistimewaan terhadap terpidana Ketut Suastika dan Mantara Gandhi. Menurut Made Tangkas, pihaknya sudah melakukan semua sesuai proses, termasuk penundaan eksekusi ini. Apalagi, penundaan eksekusi juga

dapat jaminan dari keluarga dan kuasa hukumnya. "Tidak ada yang istimewa. Hanya alasan kemanusiaan saja," dalihnya.

Terpidana Ketut Suastika dan Mantara Gandhi sebelumnya diberikan status tahanan kota, sejak 3 November 2014 lalu, saat mereka memenuhi panggilan kejaksaan selaku tersangka. Kemudian, persidangan perdana terdakwa Ketut Suastika dan Mantara Gandhi digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, 24 November 2014.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, baik terdakwa Ketut Suastika maupun Mantara Gandhi sama-sama didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan alat berat, alat studio, CCTV, instalasi listrik, telepon, dan kegiatan renovasi Taman Budaya Art Center Denpasar tahun 2011 silam. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 812.135.337 atau Rp 812,14 juta.

Kemudian, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ketut Suastika dan Mantara Gandhi dalam persidangan dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin, 16 Maret 2015 lalu. Selain divonis 14 bulan penjara, terdakwa Ketut Suastika juga diwajibkan bayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Mantara Gandhi divonis hukuman 13 bulan penjara plus wajib bayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. rez

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : \_\_\_\_\_



# Perusda Bali Ingin Kelola Taman Budaya

Meskipun ingin mengelola, Perusda Bali menegaskan tidak ada niatan untuk menguasai Taman Budaya yang selama ini sudah ada Unit Pelayanan Terpadunya (UPT).

DENPASAR, NusaBali

Perusahaan Daerah Bali mengusulkan pada Pemerintah Provinsi Bali agar diberi kewenangan untuk turut mengelola Taman Budaya Bali (Art Centre) Denpasar supaya bisa mendatangkan pendapatan yang lebih optimal. "Jika usulan kami ini disetujui, tentunya kami akan mengelola Taman Budaya itu di luar kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang memang telah rutin digelar setiap tahun," kata Direktur Utama Perusda Bali Nyoman Baskara, di Denpasar, Senin (30/3).

Meskipun ingin mengelola Taman Budaya, dia menegaskan, tidak ada niatan pihaknya untuk menguasai Taman Budaya yang selama ini sudah ada Unit Pelayanan Terpadunya (UPT), apalagi semata-mata hanya melihat dari sisi komersial. Perusda Bali, kata dia, malah akan menggandeng UPT Taman Budaya dan terkait teknisnya bisa dikoordinasikan lebih lanjut.

"Yang paling penting, kehadiran kami di situ justru untuk meningkatkan apresiasi terhadap seniman dan juga mengapresiasi seniman. Saat ini, banyak sekali seniman besar maupun maestro yang tidak dikenal oleh generasi muda. Lewat pengelolaan Taman Budaya yang lebih baik, kita juga bisa membuat para seniman menjadi lebih sejahtera," ucapnya.

Mengapa demikian, tambah dia, karena nantinya bagi pengunjung yang ingin menyaksikan pertunjukan seni akan dikenakan tiket masuk dan juga pihaknya akan menggandeng kalangan pariwisata untuk menjadikan Taman Budaya sebagai paket wisata prioritas bagi wisatawan yang berekreasi ke Bali.

"Tentunya tiket masuk yang dikenakan itu disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada, maupun jenis pementasannya. Dari hasil pendapatan itu, nantinya akan diberikan untuk para seniman yang pentas. Demikian juga dengan seniman yang bisa pentas di Taman Budaya akan diseleksi oleh tim kurator karena merekalah yang lebih mengerti," ujarnya.

Menurut Baskara, meskipun akan ada tiket masuk ke Taman Budaya, nantinya masih ada



TAMAN Budaya Bali di Jalan Nusa Indah, Denpasar. • IST

kebijaksanaan juga misalnya untuk rombongan pelajar.

Dia meyakini dengan kondisi masyarakat Bali yang sudah semakin cerdas, mereka tidak akan takut untuk membayar kalau penataan Taman Budaya menjadi lebih baik dan seniman yang ditampilkan juga berkualitas.

Pihaknya juga mengusulkan agar di Taman Budaya juga ada pemandu wisata khusus sehingga mereka itu bisa menjelaskan dengan benar pada wisatawan. Di samping di sana juga bisa digelar pameran UMKM, pameran dari sang maestro dan sebagainya. "Intinya melalui Art Center ini, kami ingin menjadikannya sebagai pintu gerbang untuk mengenali Bali sesungguhnya," katanya.

Hal senada dikemukakan Direktur Teknis dan Akuisisi Perusda Bali Wayan Tana. Menurut dia, dengan adanya tiket masuk itu sekaligus untuk mengetahui tingkat kunjungan ke Taman Budaya.

"Terkait seniman yang akan tampil kami yang akan mengaturnya, mana yang menjadi pementasan harian, mingguan dan sebagainya. Intinya kami berupaya agar setiap harinya ada aktivitas berkesenian. Termasuk nantinya akan ada pentas budaya bagi anak-anak maupun remaja," ucapnya.

Tana mengatakan sasaran kunjungan tidak sebatas wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik karena kondisinya sekarang mereka juga sangat kuat ketertarikannya untuk mengenali budaya. ant, isu

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 3



## Tingkatan Sarana Prasana SD, Disiapkan Anggaran Rp 7 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tahun ini mengalokasikan dana Rp 7 miliar untuk perhaban dan juga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), termasuk kelengkapan sarana dan prasana pengadaan ATK. Dari jumlah anggaran yang disediakan dari Dana Anggaran Khusus (DAK) 60 persen diantaranya akan digunakan untuk pembangunan fisik.

"Untuk SD tahun ini anggaran peningkatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana sebesar Rp 7 miliar. enam puluh persennya akan digunakan untuk pembangunan fisik," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Made Astika, Senin (30/3).

Meski sampai saat ini belum ada juknis pelaksanaan pembangunan dari pusat, namun Astika mengatakan jumlah tersebut sudah merupakan anggaran pasti yang akan direalisasikan. Secara umum, masing-masing kecamatan mendapatkan jatah perhaban sedang ruang belajar sebanyak 10 unit, dengan anggaran sebesar Rp. 436. 937.460 per kecamatan.

Sedangkan untuk pembangunan RKB, ada enam unit dan lima unit gedung perpustakaan. Seluruh pembangunan dilaksanakan secara swakelola. Kecuali pengadaan alat peraga termasuk ATK yang akan di tenderkan. Sampai saat ini menurut Astika sudah tidak ada perhaban berat di 503 SD/MI yang ada di Buleleng.

"Sekarang sudah tidak ada lagi sekolah dengan kerusakan berat. Itu hanya terjadi jika ada bencana. Karena setiap tahunnya kami selalu lakukan perhaban dan pembangunan RKB secara bertahap untuk pemenuhan sarana prasara pendidikan di Buleleng," imbuh dia. Sedangkan pihaknya mengaku sampai saat ini Disdik belum mengalokasikan dana perhaban dan pembangunan gedung baru jika sebuah sekolah tertimpa bencana alam. Pihaknya hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk pengalokasian anggaran. Diharapkan dengan upaya penyempurnaan sarana prasarana, kualitas pendidikan di Buleleng dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. **k23**

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 4.